

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Rencana Strategi Kementerian/Lembaga untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional

Melihat ancaman yang ada saat ini, persaingan AS-China di Laut China Selatan bisa dikategorikan sebagai bahaya laten dimana konflik ini akan memanas pada waktu yang tidak dapat diperhitungkan. Untuk itu dalam mengantisipasi ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional yang diakibatkan dari persaingan kedua negara besar tersebut dikawasan. Selin itu berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa saat ini rencana strategi K/L masih belum terdapat klausul terkait penjagaan stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan dalam rangka penjagaan stabilitas keamanan nasional diperlukan:

1. Penajaman pada rencana strategi Kementerian dan Lembaga dalam rencana program kerja yang terkait penjagaan stabilitas keamanan nasional sesuai dengan tugas masing-masing K/L.
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar K/L dalam tujuannya untuk penjagaan stabilitas keamanan nasional.
3. Meningkatkan interoperability dari sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing K/L untuk dapat di optimalisasikan penggunaannya.

Untuk itu pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan, dalam hal ini K/L terkait perlu memprioritaskan isu tersebut untuk dijadikan program yang tersusun dalam rencana strateginya untuk jangka waktu tertentu untuk mengantisipasi persaingan AS-China di LCS dalam rangka penjagaan stabilitas keamanan nasional.

5.1.2 Sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan (Kondisi Saat Ini)

Beberapa upaya sinergitas dan menjaga stabilitas kawasan dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan yang telah dilakukan adalah dengan: Melaksanakan rapat koordinasi terkait keamanan di Laut China Selatan., Melaksanakan sharing information mengenai update keamanan di Laut China Selatan. Melaksanakan patroli terkoordinasi oleh TNI (dhi TNI AL dan TNI AU/Ops Pam ALKI) dengan K/L terkait.

Pemerintah Indonesia masih terus berperan dalam mengelola konflik Laut China Selatan termasuk mendorong ASEAN dan Tiongkok untuk membentuk *Code of Conduct (CoC)*. CoC pada dasarnya merupakan implementasi dari DoC, CoC nantinya akan disusun sebagai sebuah dokumen yang mengatur tata perilaku negara-negara di wilayah Laut China Selatan namun tidak akan menyelesaikan konflik itu sendiri. Pemikiran tentang CoC pada awalnya dibahas secara intensif dalam *Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea* yang digagas oleh Indonesia.

Strategi yang ada saat ini dalam mengantisipasi persaingan antara AS-China di Laut China Selatan belum dilaksanakan secara terintegrasi antar komponen bangsa. Terutama Kementerian dan Lembaga terkait, masih terlihat adanya ego sektoral pada masing-masing institusi serta *overlapping* tugas dan kewenangannya. Masing-masing K/L bergerak

sendiri dan tidak terarah sehingga untuk mengantisipasi konflik Laut China Selatan saat ini dirasa sangat kurang

Konsep keamanan nasional dirasa masih terdapat keraguan/ambigu dalam kewenangan dan tugas serta organisasinya, terutama diantara aparat keamanan. Stabilitas keamanan saat ini yang rawan dikarenakan adanya perselisihan, sengketa, konflik yang dikuatkan akan mengakibatkan perang. Kurangnya deteksi dini dari pemerintah dalam masalah perlombaan kekuatan militer dan persaingan AS- China di Laut China Selatan yang mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa Indonesia

Indonesia perlu memperkuat sinergitas K/L untuk membangun keamanan maritim di LCS secara terpadu, sebagai antisipasi persaingan AS-China di LCS. Pandangan akan sinergitas kementerian/lembaga sebagai bagian dalam melaksanakan konsolidasi semua komponen lembaga agar siap menghadapi sebuah ancaman dari negara lain, meningkatkan pertahanan negara penting dilakukan dengan melibatkan semua lembaga negara agar bersinergi untuk membantu apabila ada ancaman dari luar, seperti yang lagi konflik di laut China selatan yang juga membuat dampak besar bagi Indonesia yang berdekatan dengan pulau Natuna. Saat ini sinergitas K/L sudah dilaksanakan melalui komunikasi dan koordinasi, namun demikian pelaksanaannya belum maksimal karena tidak ada keterpaduan dalam penggunaan sumber daya, sehingga membutuhkan elemen interoperability yang baik antar K/L dalam memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal.

Sinergi yang dilakukan pada peningkatan komunikasi dan koordinasi antar kementerian dan Lembaga. Disamping itu peningkatan interoperabilitas sumber daya yang dimiliki K/L. hal tersebut dilakukan mulai dari deteksi dini, antisipasi dan penanggulangan ancaman akibat persaingan AS-China di LCS.

Kegiatan yang tersinergi dapat disesuaikan dengan TUPOKSI K/L, diantaranya

1. Kemenko Polhukam, berkoordinasi dengan Kemhan, TNI, dan Bakamla untuk: mengawasi dan mengendalikan ZEEI secara terpadu dan merevitalisasi kekuatan pertahanan di wilayah LNU; meningkatkan peran aktif nelayan dan masyarakat pesisir; meningkatkan anggaran operasi pengawasan dan pengendalian di ZEEI.
2. Kemenlu, menyusun strategi percepatan penyelesaian masalah perbatasan dengan cara damai dan sesuai hukum internasional.
3. Kemenkeu, Bappenas, KKP, Pemda, agar bersinergi dalam menyusun master plan pembangunan terpadu di ZEEI LNU, meningkatkan keberadaan nelayan untuk mengoptimalkan SDA di LNU, mendorong pihak swasta melakukan eksplorasi/eksploitasi SDA, menjadikan LNU Kawasan Ekonomi Khusus Perikanan Nasional, membangun pelabuhan internasional guna menciptakan multiplier effect, dan mempercepat transformasi teknologipenggunaan kapal skala besar bagi nelayan lokal sesuai ekosistem laut.

Selain itu perlu dieksplisitkan dalam Rencana Strategi tentang komunikasi, koordinasi dengan K/L lain untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan tugasnya dan menghindari ketumpang tindihan

5.1.3 Strategi Sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional

Strategi sinergitas K/L dalam menghadapi persaingan AS-China, maka strategi yang dapat diterapkan, meliputi: (1) *Means*, terdiri dari

sumber daya yang dimiliki oleh Kemenko Polhukan, Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, TNI, BAKAMLA, BAPENAS, akademisi, Pemerintah Daerah serta lembaga lain yang terkait; (2) *ways*, terdiri dari diplomasi, peningkatan sumber daya, dan peningkatan sinergitas antar K/L; dan (3) *ends* guna mendukung stabilitas keamanan nasional.

Sehingga strategi tersebut dapat disusun sebagai berikut:

Peningkatan komunikasi, koordinasi dan interoperability sumber daya K/L diantaranya Kemenko Polhukam, Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, TNI, BAKAMLA, BAPENAS, akademisi, Pemerintah Daerah serta lembaga lain yang terkait, mulai dari perencanaan strategis K/L, implementasi sejak deteksi dini, antisipasi dan penanggulangan ancaman akibat persaingan AS-China di LCS guna mengantisipasi persaingan AS-China di LCS dalam rangka mendukung penjagaan stabilitas keamanan nasional

Dalam pelaksanaan sinergitas direkomendasikan tidak hanya menggunakan komunikasi dan koordinasi, seperti pada teori sinergitas yang sudah ada, tetapi diperlukan Interoperability sumber daya (**teori Sinergitas Renny 2022**). Dalam pelaksanaannya strategi sinergitas dapat dilaksanakan dengan dibuatnya program sinergitas pada level kebijakan dan akan dilaksanakan oleh sebuah *Task Force*/Angkatan Tugas dengan nama *Task Force Sinergitas K/L di LCS* yang mendapatkan arahan dan perintah dari Presiden RI dan didukung dengan peraturan Presiden, serta beranggotakan K/L terkait yang tugasnya melaksanakan strategi Sinergitas yang telah dibuat, berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing K/L.

Sinergitas antar *stakeholder* (K/L) yang terkait bidang pertahanan dan keamanan merupakan upaya strategis untuk mengantisipasi persaingan AS–China di Laut China Selatan. Sinergitas ini memungkinkan masing-masing K/L dapat berinteraksi untuk bersama-sama meningkatkan pertahanan dan keamanan di wilayah perairan tersebut, sehingga dapat menjaga stabilitas keamanan nasional.

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Rekomendasi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan atau referensi bagi akademisi dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai strategi Sinergitas kementerian dan lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan. Sehingga kelak akan muncul akademisi lain di Indonesia yang tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Sehingga akan muncul kajian-kajian strategis yang nantinya akan berguna dan dapat dijadikan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dalam skala nasional untuk penanganan Laut China Selatan, beberapa rekomendasi yang diajukan penulis sebagai berikut:

- a. **Diplomasi:** sebagai referensi dalam mengefektifkan peran Diplomasi, yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, untuk penciptaan dan pemeliharaan stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Laut China Selatan, dengan arah menegakkan COC (*Code of Conduct*), bagi Negara-negara yang berkonflik;
- b. **Pertahanan dan Keamanan;** sebagai referensi dalam penyusunan konsep peningkatan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan kawasan yang menjadi wilayah kedaulatan Negara Indonesia, dalam mengantisipasi eskalasi di kawasan Laut China Selatan, dan mengamankan serta mempertahankan wilayah kedaulatan negara Indonesia dan

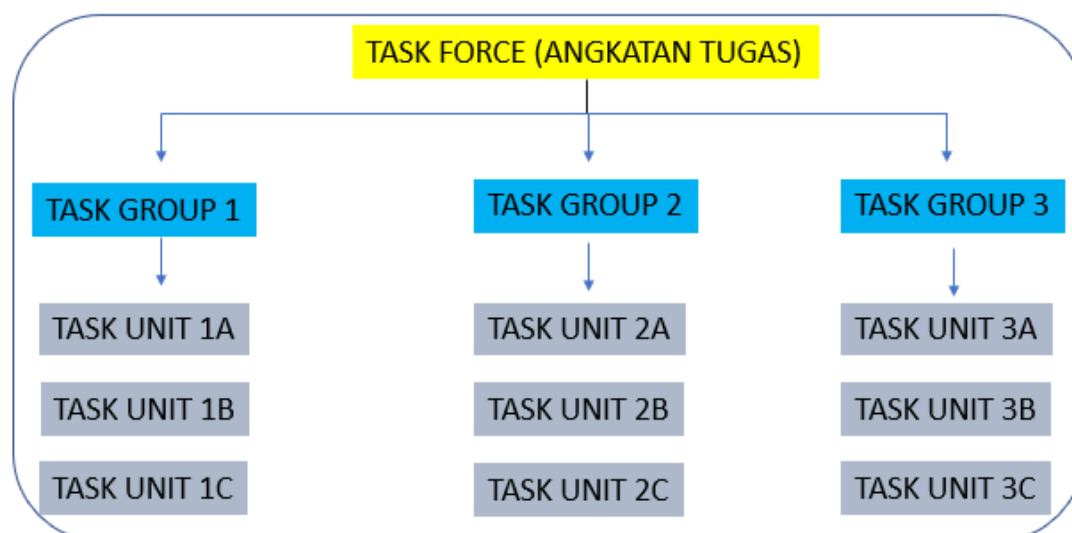
sumber daya alam yang masih menjadi hak pengelolaan kedaulatan Negara Indonesia

- c. ***Sinkronisasi dan Sinergitas Program K/L***: sebaga referensi dalam upaya sinkronisasi dan Sinergitas Program yang dilakukan K/L dari Aspek Peningkatan serta pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat yang berada pada kawasan Laut China Selatan (LCS), antara lain dalam fasilitasi dukungan sarana prasarana aktivitas sosial ekonomi dan menjaga keamanan serta keselamatan warga negara Indonesia yang sedang melakukan aktivitas di kawasan, agar Laut Natuna Utara menjadi basis baru bagi Geostrategik, Geopolitik, dan Geoekonomi RI.
- d. Penelitian ini mempunyai keterbatasan pada tiga persoalan yaitu:
- 1) Rencana strategi K/L dalam penjagaan stabilitas keamanan nasional;
 - 2) Sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di LCS;
 - 3) serta strategi sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS_China di LCS dalam rangka penjagaan stabilitas keamanan nasional pada K/L Kemenko Polhukam, Kemnko Marinvest, Kemndagri, Kemlu, Kemhan, KKP, Mabes TNI, TNI AL, Bakamla.

Hal tersebut belum mencakup tentang factor-faktor yang mungkin berpengaruh pada kondisi sinergitas K/L yang ada saat ini, untuk itu direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti tentang factors yang mempengaruhi kondisi sinergitas K/L dalam antisipasi persaingan AS-China di LCS dalam rangka penjagaan stabilitas keamanan nasional.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

Dalam perancangan strategi sinergitas Kementerian Lembaga dalam mengantisipasi persaingan AS-China di LCS dalam rangka penjagaan stabilitas keamanan nasional, dapat dilaksanakan melalui komunikasi, koordinasi dan interoperability yang baik antar Kementerian Lembaga, hal tersebut dapat diwadahi dengan Pembentukan *Task Force* (Angkatan Tugas), yang diberi nama ***Task Force Sinergitas K/L di LCS (Task Force Renny 2022)*** yang membawahi tiga *Task Group* (Gugus Tugas) dan tiga *Task Unit* (satuan tugas), sebagaimana dijelaskan dalam gambar dibawah ini.



Gambar 5. 1 *Task Force* (Angkatan Tugas)

(Sumber: Diolah Oleh Peneli, 2022)

Task Force / Angkatan Tugas, akan diketuai oleh Kemenko Polhukam, bertugas menangani permasalahan konflik di LCS.

Task Group / Gugus Tugas

- a. *Task Group* Vietnam, diketuai oleh Kemlu, bertugas: menangani permasalahan maritime dengan Vietnam. Anggota: Kemlu, Kemhan, KKP, Bakamla, TNI AL

- b. *Task Group* Malaysia, diketuai oleh Kemdagri, bertugas: menangani permasalahan maritime dengan Malaysia. Anggota: Kemlu, Kemhan, KKP, Bakamla, TNI AL
- c. *Task Group* Klaim RRT, diketuai oleh Kemhan, bertugas: menangani Klaim sepihak oleh China. Anggota: Kemlu, Kemhan, KKP, Bakamla, TNI AL

Task Unit / Satuan Tugas

- a. *Task Unit* Vietnam
 - 1) Alpha, menangani batas wilayah dengan Vietnam
 - 2) Beta, menangani permasalahan IUU Fishing dengan Vietnam
 - 3) Charlie, menangani Kerjasama bilateral dengan Vietnam
- b. *Task Unit* Malaysia
 - 1) Alpha, menangani batas wilayah dengan Malaysia
 - 2) Beta, menangani permasalahan IUU Fishing dengan Malaysia
 - 3) Charlie, menangani Kerjasama bilateral dengan Malaysia
- c. *Task Unit* Klaim China
 - 1) Alpha, menangani klaim sepihak dengan China
 - 2) Beta, menangani permasalahan IUU Fishing dengan China
 - 3) Charlie, menangani Kerjasama bilateral dengan China

Task Force ini dibuat agar dalam mengantisipasi persaingan AS-China di LCS, pemerintah mempunyai strategi nasional sehingga pelaksanaannya dapat terarah, terstruktur dan terukur. *Task Force* ini bergerak atas direktif/arahan Presiden sehingga dibutuhkan PERPRES dalam pelaksanaannya. Tugas dan Fungsi masing-masing akan dijelaskan lebih lanjut. Masing-masing *Task Group* membuat *time table* yang berisi identifikasi masalah, solusi yang dibatasi oleh *time strain*, dan evaluasi atau review pelaksanaan. Masa berlaku Task Force ini berdasarkan

kondisi lingkungan strategis. Anggaran program dibebankan pada anggaran masing-masing K/L sehingga diajukan oleh K/L sesuai tugas dan fungsi masing-masing. *Task Force* akan dilaksanakan evaluasi pelaksanaan setiap periode tertentu yang ditentukan.

Diharapkan dengan pembentukan task force ini sinergitas K/L dapat terbangun dan terlaksana dengan baik sehingga pemerintah Indonesia dapat secara dini mengantisipasi ancaman di Kawasan yang bersumber dari persaingan AS-China di Laut China Selatan dalam rangka penjagaan stabilitas keamanan nasional.